



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jalan Jenderal Sudirman Salido, Kode Pos : 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/027/C.IV.J/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KECAMATAN IV JURAI

CAMAT IV JURAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya wabah Covid-19 dan menindaklanjuti perubahan keputusan Presiden Nomor 07 tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah dan Instansi terkait;
- c. Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/S.J tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan IV Jurai;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undan Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesis tahun 1984 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undan Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekaratinaaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentan Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bnomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan Inveksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Cov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulanganya ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Kecamatan IV Jurai dengan Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau Sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Salido

Pada Tanggal : April 2020

CAMAT IV JURAI


SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si

NIP. 19720605 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Pesisir Seatan di Painan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip;

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI**

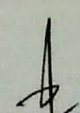
Nomor : 900/ /C.IV.J/IV/2020

Tanggal : April 2020

Tentang : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan IV Jurai**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019
(COVID-19) DI KECAMATAN IV JURAI**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
	Camat IV Jurai	Ketua
	Kapolsek IV Jurai	Ketua I
	Danramil IV Jurai	Ketua II
1	Sekretariat	
	Sekretaris Camat IV Jurai	Koordinator
	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan IV Jurai	Anggota
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan IV Jurai	Anggota
	Staf pada Kecamatan IV Jurai	Anggota
3	Pusdalops	
	Kasi Pemerintahan Kecamatan IV Jurai	Koordinator
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan IV Jurai	Anggota
	Kasi Trantib Kecamatan IV Jurai	Anggota
	Kasi Kesos Kecamatan IV Jurai	Anggota
	Kasi Pelayanan Kecamatan IV Jurai	Anggota
	Staf pada Kecamatan IV Jurai	Anggota
4	Operasi	
	A. Pencegahan	
	Bhabinkamtibmas	Koordinator
	Babinsa	Anggota
	Staf pada Kecamatan IV Jurai	Anggota
	Wali Nagari se-Kecamatan IV Jurai	Anggota
	B. Penanganan	
	Ka. Puskesmas Salido dan Ka. Puskesmas Lumpo	Koordinator
	Satgas Kesehatan Kecamatan IV Jurai	Anggota
	Bidan Desa se-Kecamatan IV Jurai	Anggota

CAMAT IV JURAI


SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si

NIP. 19780215 199802 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

Nomor : 900/ /C.IV.J/IV/2020

Tanggal : April 2020

Tentang : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan IV Jurai

Tugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan IV Jurai

I. KETUA

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana Operasional dan melaksanakan penanganan
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan.
- c. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

II. SEKRETARIAT

Mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Administrasi

- a. Administrasi surat menyurat
- b. Kegiatan protokoler
- c. Dukungan Sekretariat.

B. Keuangan

- a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
- b. Sumber pendanaan

III. PUSDALOPS

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan pengelolaan data (database)
- b. Pengembangan dan Operasional sistim Informasi, komunikasi dan elektronik.
- c. Strategi komunikasi.
- d. Media monitoring.
- e. Pelaporan.

IV. OPERASI

Mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di Kecamatan :

- a. Pengamanan dan Gakum
Mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- b. Pencegahan
Mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- c. Penanganan
Mempunyai tugas melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
- d. Pemulihan dan Layanan Dasar
Mempunyai tugas melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

CAMAT IV JURAI


SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si

NIP. 19780215 199802 1 001